

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin inovatif dan kreatif. Dapat dengan mudah ditemukan bermacam produk olahan makanan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari luar negeri. Bahkan saat ini banyak pembuatan olahan yang kandungan makanannya belum tentu semua jelas kehalalannya.¹

Pangan halal adalah pangan yang sudah memenuhi syariat islam baik dari bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang islam.² Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting yang saling berkaitan, yaitu mengenai label halal dan sertifikat halal. Label halal merupakan kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasang pada kemasan suatu produk, sedangkan sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang diproduksi oleh

¹ Rachmad Usman, 2004, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, hal. 74.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 34.

produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan.³

Setiap produsen yang hendak mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa adanya sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Hingga saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Sebagian produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal tersebut dirasa lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.⁴ Dalam UUJPH telah mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia menggantikan LPPOM-MUI. BPJPH dalam menjalankan kewenangannya akan bekerja sama dengan kementrian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁵

Namun juga banyak produsen yang belum memiliki sertifikat halal dalam produk ataupun perusahaannya, sehingga banyak orang yang

³ Yuli Dian Iskandar, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 4.

⁴ LP POM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Ummat*, Nomor 59 Tahun X, 2005, hal. 15.

⁵ Susilowati Suparto, dkk, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*, Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3, Oktober, 2016, hal. 431.

mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan semata. Dalam proses produksi banyak sekali produsen yang menggunakan bahan tambahan atau bahan kimia berbahaya juga bahan yang mengandung unsur non halal. Begitupun dalam proses selanjutnya seringkali pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar upaya produk pangan mereka laku di pasaran.⁶

Seperti halnya kasus lemak babi pada tahun 1988, kasus MSG ajinomoto, juga merk dendeng dan abon sapi yang positif mengandung babi. Serta beberapa kasus lain yang ditemukan di pasaran diantaranya adalah sapi glonggongan. Dan masih banyak lagi bahan pangan atau makanan siap saji yang beredar di pasaran yang belum tentu kehalalannya baik dari bahan ataupun proses produksinya. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang tegas dan kuat terkait produk halal.

Banyak peluang yang dapat menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh sebab itu dalam hal melindungi konsumen diperlukannya hukum yang jelas agar konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Sebagai negara hukum dengan penduduk mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka menjadi tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen Indonesia. Salah satu jaminan perlindungan hak konsumen muslim tersebut yaitu

⁶ Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, Edisi 3, 2015, hal. 28.

jaminan produk halal yang akan mereka konsumsi dari produk barang atau jasa.⁷

Melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen adalah bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan. UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi dan harus dijadikan acuan serta rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan perekonomian dimaksud agar bersifat mengikat dan memaksa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.⁸

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan jaminan yang seharusnya didapat oleh para konsumen atas setiap pembelian produk bahan makanan dari pelaku usaha. Tetapi kenyataannya pada saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaannya belum maksimal atau kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataannya.

⁷ Ema Fatimah dan Siti Zailia, *Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Muamalah Vol. 3, No. 1, Juni, 2017, hal. 74.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, hal. xi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁹

Dari uraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN PRODUK PANGAN HALAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah yang yang diteliti adalah:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan halal?
2. Bagaimana perlindungan hukum oleh BPOM terhadap produk pangan halal yang beredar di masyarakat?

⁹ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 01, Maret, 2017, hal. 100-101.

3. Bagaimana peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan halal yang beredar di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penulisan secara umum dan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai perlindungan hukum oleh negara terhadap penyediaan produk pangan halal.

2. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan halal.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk pangan halal yang beredar di masyarakat.
- c. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan halal yang beredar di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktik di lapangan.
- b. Untuk menambah literatur atau bahan referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai media bagi peneliti untuk menambah pengalaman dibidang penelitian dan menambah pengalaman mengenai apa yang menjadi fokus penelitian.

- b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat serta mengembangkan pemasaran produk halal.

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang, pengolahan pangan sudah begitu kompleks. Produsen menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan produksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan tambahan, termasuk bahan pewarna yang tidak dapat dipisahkan dari pembuatan makanan dan minuman.¹⁰

Konsumen perlu dilindungi dari penggunaan produk dalam negeri terutama yang berasal dari pelaku usaha Indonesia. Pencantuman label halal dan tanggal kadaluwarsa perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. BPOM harus lebih teliti dalam hal mengawasi produk-produk yang sudah lewat tanggal kadaluwarsa agar konsumen tidak merasa dirugikan.¹¹

Di Indonesia dalam hal perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang ini. Perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal tersebut sangat penting bagi kaum muslimin, karena mengkonsumsi makanan halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar.

¹⁰ KN Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14, No. 2, Mei, 2014, hal. 228.

¹¹ Mardiyono, *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 19, No. 1, Juni, 2014, hal. 63.

Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama bagi konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Konsumen akan merasa tentram jika produk pelaku usaha benar-benar terdapat jaminan kehalalannya. Di Indonesia hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga mendapat manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif terhadap dunia usaha.

Sesuai amanat UUJPH maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2019. Dalam ketentuan PP ini peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal tetap sentral. MUI akan memberikan fatwa halal atau tidaknya suatu produk, sedangkan BPJPH dan instansi terkait akan fokus terhadap aspek operasional, administrasi, edukasi serta kerjasama.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.¹² Adapun pengumpulan

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

data yang diperlukan sebagai materi penelitian ini yakni menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.¹³ Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan peraturan-peraturan yang penerapannya dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum oleh negara terhadap produk pangan halal.

3. Lokasi Penelitian

¹³ Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

Lokasi penelitian bertempat di Loka POM Jl. Letjen Suprpto No. 5 Kerten, Laweyan, Surakarta 57138. Lokasi tersebut dipilih karena penulis merasa tempat tersebut lumayan dekat sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas (autoritatif).¹⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.47.

Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian atau website yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni warga masyarakat.¹⁶ Data ini diperoleh melalui proses wawancara terhadap responden atau narasumber yang dianggap mengetahui informasi yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca, mengutip, merangkum dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan atau pihak terkait dengan menanyakan pertanyaan perihal objek penelitian.

c. Kuesioner

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal. 12.

Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara menyebar angket yang berisi serangkaian pertanyaan tertulis kepada masyarakat atau sekelompok orang untuk mendapatkan tanggapan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian adalah dengan menggunakan logika deduktif, yakni untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat disusun sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan tentang kesadaran masyarakat, tinjauan tentang perlindungan konsumen dan tinjauan tentang produk pangan halal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana kesadaran masyarakat terkait

konsumsi makanan halal, bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk pangan halal dan bagaimana peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan halal.

BAB IV : PENUTUP. Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.